

BAB 1V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan *Advocacy Coalition Framework* (ACF), dapat disimpulkan bahwa media sosial berperan signifikan sebagai trigger *Policy* dalam isu KIP-K Universitas Diponegoro tahun 2024. Kemunculan unggahan di platform X dan Instagram menjadi pemicu awal terbentuknya perhatian publik terhadap dugaan ketidaktepatan sasaran penerima KIP-K. Viralitas konten tersebut membangun narasi kolektif mengenai ketidakadilan distribusi bantuan pendidikan, yang kemudian berkembang menjadi tekanan publik terhadap pihak kampus untuk memberikan klarifikasi dan evaluasi. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai sumber daya strategis yang mempercepat penyebaran isu, membentuk opini publik, serta mendorong isu tersebut masuk ke dalam agenda kebijakan internal kampus.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa isu KIP-K berkembang dalam suatu *Policy subsystem* yang memperlihatkan terbentuknya dua koalisi advokasi utama. Koalisi A yang terdiri dari unsur birokrasi kampus dan pengelola program menekankan legitimasi prosedural, validitas administrasi, serta perlindungan privasi penerima bantuan. Sementara itu, Koalisi B yang terdiri dari mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan menekankan nilai keadilan distributif, transparansi, dan akuntabilitas kebijakan pendidikan. Kedua koalisi tersebut memiliki perbedaan belief system, khususnya pada level *Policy Core beliefs*, yang kemudian membentuk perbedaan strategi advokasi.

Proses negosiasi antar koalisi terjadi melalui interaksi tidak langsung di ruang digital maupun melalui mekanisme klarifikasi formal. Koalisi B menggunakan strategi mobilisasi opini publik, framing isu, dan tekanan moral melalui media sosial. Sebaliknya, Koalisi A menggunakan sumber daya formal seperti otoritas institusional, mekanisme verifikasi administratif, dan komunikasi resmi untuk mempertahankan legitimasi kebijakan. Dalam dinamika tersebut, muncul peran *Policy Broker* yang berfungsi menjembatani konflik, meredam eskalasi ketegangan, serta mengarahkan proses menuju penyelesaian yang lebih terstruktur.

Hasil akhir dari proses negosiasi tersebut menghasilkan *Policy Output* berupa respons klarifikasi, evaluasi internal, dan penegasan mekanisme verifikasi penerima KIP-K. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan atau respons kebijakan tidak terjadi secara linear, melainkan melalui proses kontestasi dan negosiasi antar koalisi yang dipengaruhi oleh belief system, sumber daya, strategi advokasi, serta tekanan publik di ruang digital.

Namun demikian, proses advokasi berbasis media sosial juga memunculkan konsekuensi negatif berupa praktik *Doxxing*, *Cyberbullying*, dan stigmatisasi sosial terhadap individu yang diduga terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas media sosial sebagai alat advokasi perlu diimbangi dengan etika digital dan mekanisme klarifikasi yang terstruktur agar tidak berubah menjadi bentuk kekerasan sosial.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut

1. Pertama, bagi Universitas Diponegoro dan pengelola program KIP-K, diperlukan penguatan mekanisme komunikasi publik yang lebih responsif dan transparan ketika isu kebijakan berkembang di ruang digital. Kampus perlu mengembangkan sistem klarifikasi dan mediasi yang cepat agar tekanan publik tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Selain itu, fungsi *Policy Broker* perlu diperkuat melalui unit atau mekanisme resmi yang mampu menjembatani kepentingan mahasiswa dan birokrasi secara konstruktif.
2. Kedua, perlu adanya penguatan literasi etika digital di kalangan mahasiswa agar advokasi kebijakan dilakukan secara bertanggung jawab. Media sosial dapat tetap menjadi ruang partisipasi publik, namun penggunaannya harus disertai verifikasi informasi, perlindungan privasi, serta kesadaran akan dampak psikologis *Doxxing* dan *Cyberbullying*.
3. Ketiga, bagi pemerintah dan pengelola kebijakan pendidikan secara umum, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap sistem verifikasi dan pengawasan penerima bantuan KIP-K agar kepercayaan publik tetap terjaga. Transparansi prosedural dan akuntabilitas administrasi menjadi kunci untuk mencegah munculnya kembali isu serupa.

4. Keempat, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas analisis pada perbandingan antar perguruan tinggi atau mengkaji lebih dalam dinamika *Policy-oriented learning* dalam ACF, sehingga dapat diketahui apakah advokasi berbasis media sosial benar-benar menghasilkan perubahan kebijakan jangka panjang atau hanya respons situasional.